



PSBB JAKARTA, DIY PERKETAT PENGAWASAN Pemudik Diwajibkan Isolasi Mandiri 14 Hari

YOGYA (KR) - Kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadikan sejumlah daerah, termasuk DIY melakukan antisipasi. Salah satunya dengan memperketat pengawasan kedisiplinan terhadap para pemudik dari Jakarta untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tindakan itu dilakukan untuk memastikan penerapan protokol kesehatan bisa dilaksanakan dengan baik.

"Dampak dari adanya PSBB di DKI Jakarta, kami Pemda DIY sudah menginstruksikan kepada kabupaten/kota untuk memperketat pengawasan. Terutama bagi pemudik dari DKI Jakarta diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Semua itu dilakukan untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19. Karena dalam kondisi sekarang tidak mungkin lagi dilakukan pengetatan melihat situasi transportasi yang sudah terbuka begini," kata Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad di Yogyakarta, Senin (14/9).

Noviar mengungkapkan, pengetatan pengawasan itu dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan pemudik menyusul kebijakan PSBB di DKI Jakarta. Bahkan supaya hasilnya optimal personel linmas bersama Babinsa dan Babinkamtibmas

di seluruh desa akan memastikan setiap pemudik yang datang dari luar daerah. Terutama yang berasal dari DKI Jakarta betul-betul melakukan isolasi mandiri selama 14 hari untuk mencegah penyebaran Covid-19. Karena selain penegakan protokol kesehatan, isolasi mandiri masih diyakini efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

"Dalam kondisi seperti sekarang Satgas di desa-desa dan Linmas memiliki peran penting untuk melakukan pengawasan. Sehingga begitu ada pemudik yang datang bisa langsung terpantau dan diminta untuk melakukan isolasi mandiri. Selain itu saya juga minta kepada warga DIY untuk proaktif dan melaporkan setiap adanya pemudik yang datang di lingkungan masing-masing kepada pengurus setempat," papar Noviar.

Menurutnya, penegakan protokol kesehatan selalu menjadi prioritas bagi tim gugus tugas. Oleh karena itu sejumlah upaya terus dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih disiplin dalam penegakan protokol kesehatan. Bahkan sebagai bentuk keseriusan apabila terbukti ditemukan adanya pelanggaran, pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang ada. (Ria)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005